

Pemprov DKI Diminta Tak Molor Cairkan Bansos pada Ramadhan

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak molor dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada bulan suci Ramadhan. Dia mewanti-wanti Pemprov DKI segera mencairkan bantuan tersebut sebelum Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriyah.

karta ditetapkan sebagai penerima bansos tahun 2023, seharusnya bansos itu sudah cair sejak bulan pertama tahun ini. Sekali pun pada bulan pertama baru bisa dilakukan administrasi, setidaknya bantuan itu cair pada bulan kedua.

Kenyataannya tidak demikian. "Beberapa tahun ke belakang, bantuan baru cair sekitar bulan April-Mei. Ini terlalu lama, walaupun saldonya dirapel dari bulan Januari. Tapi tetap baru bisa digunakan mendekati tengah tahun," terang Idris.

Dengan berkaca dari molornya pencairan bantuan tersebut, Idris menegaskan, agar Pemprov DKI Jakarta memberikan atensi. Terutama pencairan bantuan pada bulan suci Ramadhan agar dapat dimanfaatkan oleh para penerima bantuan menjelang berlebaran.

"Harus akseleratif, sudah masuk bulan puasa, namun bantuan belum diterima oleh masyarakat. Segera dikejar bulan puasa ini karena para penerima butuh bantuan tersebut," ucap Idris. ● yan

Kaesang Diminta Jadi Wali Kota Depok, DPC PDIP: Kenapa Jauh-jauh Cari ke Solo

JAKARTA (IM) - Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep kembali menjadi perbincangan di dunia maya karena diminta turun untuk maju dalam Pilkada Depok 2024 sebagai calon Wali Kota Depok.

Pusat)," katanya.

Menurut HTA untuk Pilkada Depok 2024 mendatang, Depok tidak kekurangan sosok potensial dan tidak perlu mengimpor dari daerah lain.

"Kenapa musti jauh-jauh ke Solo cari calon, Depok tidak kekurangan tokoh yang bagus-bagus, tapi saya kembalikan semua kepada Keputusan DPP Partai dan Ketua Umum," tutur HTA.

Namun, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hendrik Tangke Allo menegaskan bahwa pihaknya masih fokus untuk mempersiapkan Pileg pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kami belum berfikir ke arah sana, karena kami melakukan tahap demi tahap, masih fokus memikirkan solusi untuk persoalan-persoalan rakyat," kata HTA, sapaannya, Rabu (29/3).

Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini menyatakan bahwa sah-sah saja muncul dukungan GP Center kepada Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Depok 2024.

"Tidak masalah, siapa pun boleh mendukung, mau deklarasi pun sah-sah saja, tapi kami di partai memang belum ada arahan, karena yang mencalonkan itu Parpol, ya di Ketua Umum dan DPP (Dewan Pimpinan

HTA pun menyebutkan beberapa tokoh potensial di Depok, seperti Supian Suri dan Nina Suzana yang merupakan ASN di Depok, juga ada tokoh politik, yakni Yeti Wulandari (Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra), Tajudin Tabri (Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar), Hamzah (Anggota DPRD dari Partai Gerindra), Edi Sitorus (anggota DPRD dari Partai Demokrat, Mazhab HM dan Qonita Lutfiah (anggota DPRD dari PPP).

"Selain itu, di Depok juga banyak tokoh dari Nahdlat Ulama yang memiliki kepiawaian menjadi pemimpin. Dan tentunya juga adalah kader-kader terbaik dari PDI Perjuangan," ucap HTA. ● yan

4 Metropolis



KONFERENSI PERS MAYBANK MARATHON 2023

Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria (kedua kiri) bersama Race Director Bangsaen 42 Chonburi Marathon Rut Jiroajvanichakorn (kedua kanan) didampingi Sekjen PB PASI Tigor Tanjung (kanan), dan Race Director Maybank Marathon 2023 Widya Permana (kiri) menunjukkan dokumen kerja sama sister marathon dalam konferensi pers Maybank Marathon 2023 di Jakarta, Rabu (29/3). Maybank Indonesia mengumumkan penyelenggaraan ajang World Athletics? Elite Label Road Race Maybank Marathon 2023 yang akan dilaksanakan di Bali Safari & Marine Park Gianyar pada 27 Agustus 2023 dengan memperlombakan kategori marathon (42,195 km), half-marathon (21,1 km) dan 10K, serta Children Sprint dengan total hadiah lebih dari Rp2,7 miliar.

Anggota DPRD DKI: Jangan Kucing-kucingan Rotasi Pejabat

Pj Gubernur tidak pernah memberi tahu akan adanya proses-proses itu. Jangankan prosesnya, berita akan ada pelantikan saja justru kami mendapatkan beritanya bukan dari BKD (badan kepegawaian daerah) tapi justru dari orang lain, ini sangat disayangkan, kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiantoro.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiantoro mengomentari Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang melakukan banyak rotasi pada para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Dia mengkomplain tidak adanya komunikasi atau upaya melibatkan Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam proses rotasi, dan menganggap pelantikan yang dilakukan terkesan kucing-kucingan.

"Tidak sekadar dadakan, semacam kucing-kucingan," kata Karyatin kepada wartawan, Rabu (29/3). Karyatin mengatakan, sebenarnya Pj kepala daerah memang diperbolehkan

melakukan rotasi, mutasi, atau perombakan pejabat, sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, dia mempersoalkan proses mekanisme yang sama sekali tidak menginformasikan kepada legislatif.

"Yang lebih disoroti adalah kami selaku mitra kerja Pj Gubernur tidak pernah dikasih tahu akan adanya proses-proses itu. Jangankan prosesnya, berita akan ada pelantikan saja justru kami mendapatkan beritanya bukan dari BKD (badan kepegawaian daerah) tapi justru dari orang lain, ini sangat disayangkan," ujar Politisi PKS tersebut.

Dengan tidak komunikatifnya Pemprov DKI Jakarta,

dia menilai perombakan para pejabat yang dilakukan cukup masif belakangan ini bisa jadi dilakukan berdasarkan like or dislike atau tidak objektif. "Itu penilaian saya ya (rotasi berdasarkan like or dislike) karena saya melihatnya tidak dilalui secara tahapan-tahapannya," kata dia.

Di samping itu, dia menandakan adanya perombakan yang tidak langsung diisi oleh penggantinya, atau diganti sementara dengan pelaksana tugas (Plt). Menurutnya tidak perlu pakai Plt, alias sudah ada penggantinya supaya meminimalisasi kinerja yang tidak maksimal atau bahkan kekosongan.

"Menurut saya rotasi-rotasi yang terjadi kemarin itu tidak diperhitungkan secara cermat, seharusnya lebih cermat lagi jangan sampai proses-proses kerja yang ada di masing-masing SKPD itu dalam pelayanan publik jadi tidak maksimal," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Heru Budi merotasi sebanyak 20 pejabat eselon II DKI Jakarta dan melantik para penggantinya pada Selasa (21/3). Di antara para pejabat yang dirotasi adalah

beberapa kepala dinas yang lembaganya terbilang strategis, seperti Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti, Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sarjoko, dan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho. Informasinya, posisi-posisi itu diisi oleh Plt. Lalu, ada sedikit 'kejutan' dari digantinya Yani Wahyu Purwoko oleh Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

Uus diketahui sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat (2020-2021) dan dicopot dari jabatannya oleh Anies

Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lantas di era Heru Budi kembali menempati jabatan itu.

Kabar perombakan pejabat BUMD juga terdengar santer. Terbaru, Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan yang dikenal kerap kali mengkritik habis-habisan Pemprov DKI Jakarta kini justru menjadi komisaris PT LRT Jakarta. Sementara perombakan direksi di PT Transjakarta dilakukan seiring dengan informasi dirutnya, Kuncoro Wibowo, tersandung kasus dugaan korupsi, padahal memimpin BUMD tersebut baru dua bulan. ● yan

Wali Kota Jakut Tawarkan Warga Kampung Bayam Pindah ke Rusun Lain

JAKARTA (IM) - Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim berencana menawarkan alternatif kepada eks warga Kampung Bayam untuk pindah ke rusun lantaran hingga saat ini belum bisa mengghuni Kampung Susun Bayam yang dibangun PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Saya mau tahu ya, mereka mau nggak ke rusun? Kalau mereka mau saya cariin. Kasihin juga," kata Ali saat ditemui di Kamal Muara, Jakarta Utara, kemarin.

Ia berniat mencari rusun (rumah susun) apabila eks warga Kampung Bayam bersedia. "Bukan (Kampung Susun Bayam), rusun yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Syachrial Syarif mengatakan warga tersebut belum bisa mengghuni kampung susun karena legalitas. Menurut dia, legalitas pengelolaan Kampung Susun Bayam belum rampung. Atas dasar itu, Ali berniat mencari rusun bagi warganya itu. Mengingat proses legalitas bukan ranah Pemerintah Kota (Pemkot).

"Kalau memang mau saya carikan rusun aja karena ini belum-masih proses, sementara prosesnya bukan di tingkat kota," kata dia. Sementara itu, Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) kembali melayangkan keberatan administratif pada Heru Budi dan Jakpro karena telah gagal memenuhi pemulihan hak 75 warga Kampung Bayam yang tergusur akibat pembangunan JIS pada 20 Februari 2023 di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta pukul 10.00 WIB.

"Masa tanah dan pohon diperhatikan tapi manusia tidak," kata salah satu warga yang tergabung dalam aliansi Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB). Warga Kampung Bayam menitikberatkan pada sisi kemanusiaan yang diabaikan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan pemerintah DKI Jakarta. Seruan aksi PWKB itu merupakan tindak lanjut dari aksi-aksi sebelumnya pada Bulan Desember lalu sekaligus menuntut janji dari pihak Jakpro dan pemerintah provinsi DKI Jakarta agar mereka bisa segera menempati Kampung Susun Bayam. ● yan

LAPORAN KEUANGAN PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk

KANTOR PUSAT: Kampung Cimenyang, RT 003/ RW 003, Desa Cintiaasih, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat 43261

PT DEWI SHRI FARMINDO: www.dewishrifarmindo.com

Financial statement table with columns: LAPORAN POSISI KEUANGAN, Tanggal 31 Desember 2022, (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain), 31 Desember 2022, 31 Desember 2021. Rows include ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS, and JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS.

Financial statement table with columns: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain), 31 Desember 2022, 31 Desember 2021. Rows include Pendapatan, LABA KOTOR, LABA USAHA, LABA SEBELUM PAJAK, and LABA PER SAHAM.

Financial statement table with columns: LAPORAN ARUS KAS, Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain), 31 Desember 2022, 31 Desember 2021. Rows include ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI, and KAS SETARA KAS PADA AWAL TAHUN.

Financial statement table with columns: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain), Modal Saham, Tambahan Modal Disetor, Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, Saldo Laba, Jumlah Ekuitas. Rows include Saldo 1 Januari 2021, Saldo 31 Desember 2021, and Saldo 31 Desember 2022.

Catatan: Laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perusahaan tanggal 20 Maret 2023.

Jakarta, 30 Maret 2023 PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk Direksi